

Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah Plastik: Studi Kasus di Kabupaten Lamongan

Wartono¹, Yendra Erison¹, Eva Nur Laily Rohmah¹

¹Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan, Indonesia

ABSTRACT

The problem of plastic waste is a crucial issue facing many regions, including Lamongan Regency, which experiences a significant increase in waste volume each year. Despite management programs, such as "Green Lamongan," environmental problems persist due to limited infrastructure, low public awareness, and weak collaboration between stakeholders. This study aims to analyse the forms of collaboration between local governments and local communities in plastic waste management and identify the challenges and impacts of these programs. The method used was descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation studies from official government sources and online media. The results show that initiatives such as the "Berkah Mandiri" Waste Bank and the "Sampahku Tanggungjawabku" (My Waste is My Responsibility) program (Samtaku) have contributed significantly to promoting a circular economy, reducing waste volume, and increasing community participation. These programs have generated economic value of up to IDR 5 billion per year and opened recycling-based business opportunities. However, challenges remain, such as a lack of facilities, suboptimal inter-agency coordination, and community resistance to behavioral change. In conclusion, strong collaboration, ongoing education, and infrastructure support are the keys to the success of participatory and sustainable plastic waste management in Lamongan Regency.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 01-10-2025

Revised: 13-10-2025

Accepted: 14-10-2025

KEYWORDS

collaboration, plastic waste, local government, local community, clean lamongan 2025

Corresponding Author:

Wartono

Universitas Islam Darul 'Ulum, Lamongan, Indonesia

Email: wartono.2023@mhs.unisda.ac.id

Pendahuluan

Isu lingkungan, khususnya permasalahan sampah plastik, telah menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Di Indonesia, permasalahan ini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah per tahun, di mana sekitar 17% di antaranya merupakan sampah plastik (KLHK, 2023). Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pengelolaan sampah, terutama plastik, belum dilakukan secara optimal, terutama di daerah-daerah yang masih minim infrastruktur persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat (Setiawan & Erison, 2024)

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu daerah pesisir di Provinsi Jawa Timur, tidak luput dari persoalan ini. Sebagai kabupaten dengan garis pantai sepanjang 47 kilometer dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa (BPS Kab. Lamongan, 2023). Lamongan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik yang sulit terurai. Di kawasan pesisir seperti Kecamatan Paciran dan Brondong, misalnya, volume sampah plastik yang mencemari pantai dan laut meningkat setiap tahunnya, yang tidak hanya mengganggu ekosistem laut tetapi juga berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata lokal.

Fenomena meningkatnya volume sampah plastik di Lamongan tidak terlepas dari berbagai faktor. Pertama, budaya konsumtif masyarakat yang masih tinggi terhadap produk sekali pakai. Kedua, belum meratanya fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan bank sampah di seluruh kecamatan. Ketiga, masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Keempat, adanya gap koordinasi antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal dalam menjalankan program-program kebersihan lingkungan. Persoalan ini menjadi perhatian serius, terutama ketika dampaknya semakin nyata dalam bentuk pencemaran sungai, irigasi pertanian, dan laut yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir (Erison et al., 2023) (Sholikin et al., 2025).

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan inisiatif Program "Lamongan Hijau", yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengurangan sampah plastik. Program ini dirancang sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2021–2026. Salah satu pilar utama dari program ini adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal, seperti karang taruna, kelompok ibu PKK, sekolah, pesantren, dan komunitas lingkungan untuk menginisiasi kegiatan bersih-bersih, edukasi pengelolaan sampah, dan pengembangan bank sampah di tingkat desa dan kecamatan.

Namun demikian, sejauh ini pelaksanaan Program "Lamongan Hijau" masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang mencuat adalah belum optimalnya koordinasi antara pihak pemerintah daerah dan komunitas lokal. Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa tokoh masyarakat dan pegiat lingkungan di Kecamatan Paciran dan Lamongan kota, diketahui bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas arah dan strategi program ini. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan masih bersifat top-down, sehingga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Di sisi lain, terdapat komunitas lokal yang secara mandiri telah mengembangkan inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti Bank Sampah Induk "Sampahku Tanggung Jawabku" di Kecamatan Deket, serta gerakan "*Zero Waste School*" di beberapa SMP dan SMA di Lamongan. Sayangnya, inisiatif-inisiatif positif tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan resmi pemerintah daerah, sehingga dampaknya masih terbatas secara spasial dan temporal. Ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pemberdayaan komunitas lokal yang dapat dimaksimalkan melalui model kolaborasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Studi dari Nugroho dan Prabowo (2022) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di daerah sangat ditentukan oleh adanya kemitraan sinergis antara aktor pemerintah dan non-pemerintah, termasuk lembaga pendidikan, LSM, dan kelompok masyarakat. Model kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) dinilai efektif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan mempercepat pencapaian tujuan lingkungan berkelanjutan.

Maka dari itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana bentuk dan efektivitas kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam penanggulangan sampah plastik di Kabupaten Lamongan, khususnya melalui kajian terhadap implementasi Program "Lamongan Hijau". Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*), kendala-kendala yang dihadapi, serta potensi penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Lamongan (Rohmah, 2022).

Selain sebagai kontribusi akademik dalam bidang studi kebijakan publik dan tata kelola lingkungan, penelitian ini juga memiliki urgensi praktis. Pertama, sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih responsif dan berbasis partisipasi masyarakat. Kedua, sebagai inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam mengembangkan program serupa yang menekankan pada kolaborasi dan pemberdayaan komunitas. Ketiga, sebagai langkah awal dalam membangun budaya lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di tingkat lokal.

Dalam konteks kebijakan nasional, penelitian ini juga sejalan dengan target Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang menargetkan pengurangan 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025 (Kemenko Maritim, 2021). Kabupaten Lamongan sebagai wilayah pesisir memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian target ini. Oleh karena itu, model kolaborasi lokal yang berhasil di Lamongan dapat menjadi contoh praktik yang layak direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan kolaboratif dalam tata kelola lingkungan (*collaborative environmental governance*), yang menekankan pada pentingnya partisipasi aktif, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan kesetaraan antara para aktor dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang kompleks (Ali et al., 2024). Penelitian ini juga mengacu pada kerangka kerja "4P" dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu *Public-Private-People-Partnerships* (PPPP) yang menggabungkan peran pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan media.

Dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, potensi program, serta pendekatan teoritis yang relevan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Selain untuk memberikan gambaran empirik mengenai dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah plastik di tingkat lokal, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan cita-cita Lamongan Bersih 2025.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam penanggulangan sampah plastik melalui program "Lamongan Hijau". Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam proses sosial yang kompleks, termasuk interaksi antar pihak, peran aktor lokal, serta implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna, perspektif, dan proses yang terjadi dalam konteks sosial secara alami dan tidak dapat diukur dengan angka statistik semata.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan fokus pada empat kecamatan: Kecamatan Lamongan (perkotaan), Kecamatan Deket (pusat bank sampah induk), Kecamatan Paciran dan Brondong (wilayah pesisir yang terdampak langsung oleh pencemaran sampah plastik). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial-ekologis serta tingkat keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan program "Lamongan Hijau". Variasi lokasi ini memungkinkan peneliti mengamati perbedaan strategi dan tantangan kolaboratif di berbagai konteks lokal.

Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi program dan isu pengelolaan sampah plastik. Informan terdiri atas perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, aparat kecamatan dan desa, pengelola bank sampah, aktivis komunitas lingkungan, tokoh masyarakat, serta kader lokal seperti PKK dan karang taruna. Jumlah informan direncanakan sebanyak 15 orang, tetapi bersifat fleksibel mengikuti prinsip saturasi data, yakni pengumpulan data dihentikan saat tidak ada informasi baru yang signifikan diperoleh (Guest, Bunce, & Johnson, 2006).

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai persepsi, pengalaman, peran, serta dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengelolaan sampah plastik. Observasi dilakukan di lapangan untuk mencatat interaksi aktor, kegiatan kebersihan, pengelolaan bank sampah, dan praktik lain yang relevan dengan program. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelusuran laporan kegiatan, regulasi daerah, notulensi rapat, serta publikasi media yang terkait dengan implementasi program.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2006), yang terdiri dari tahapan: (1) transkripsi dan pembacaan data secara berulang; (2) penandaan kode awal; (3) pencarian tema; (4) peninjauan tema; dan (5) penulisan narasi temuan. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola penting dalam narasi para informan serta menyusun interpretasi yang relevan secara teoritis dan empiris. Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dari berbagai aktor dengan posisi dan peran berbeda (Patton, 1999).

Secara teoritis, penelitian ini berada dalam kerangka tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan isu-isu publik yang kompleks, seperti masalah lingkungan (Ansell & Gash, 2008). Model ini menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat tergantung pada kepercayaan, partisipasi aktif, dan struktur koordinasi yang jelas antar pihak yang terlibat.

Namun demikian, dalam tinjauan pustaka ditemukan bahwa sebagian besar studi tentang kolaborasi dalam pengelolaan sampah masih berfokus pada kota-kota besar dan belum banyak yang menelaah konteks kabupaten pesisir atau semi-perkotaan. Sebagai contoh, penelitian oleh Wibowo dan Indriasari (2021) mengkaji strategi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Surabaya dan menekankan efektivitas bank sampah. Studi lain oleh Rahman dan Suryani (2022) menyoroiti keterbatasan kapasitas

kelembagaan dalam pengelolaan sampah di kota-kota menengah, namun tidak membahas secara spesifik dinamika kolaboratif dengan komunitas lokal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam dua aspek utama. Pertama, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dalam konteks daerah pinggiran atau kabupaten, khususnya yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam seperti Lamongan. Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek teknis pengelolaan sampah atau peran tunggal pemerintah, tanpa mengulas secara mendalam relasi dan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam bingkai program daerah yang berbasis target lingkungan, seperti "Lamongan Hijau".

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan pemetaan bentuk kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkaya literatur tentang tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang kontekstual untuk meningkatkan efektivitas program lingkungan di tingkat kabupaten. Dengan pendekatan kualitatif dan penekanan pada dinamika sosial, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan perspektif baru dalam studi kebijakan lingkungan dan kolaborasi daerah.

Hasil dan Diskusi

1. Profil Timbulan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, dengan timbulan mencapai sekitar 382,80 ton per hari (Ilham, 2020). Sebagian besar sampah ini berasal dari rumah tangga, kawasan industri, dan komersial. Sebelum adanya inovasi pengelolaan sampah yang efektif, sebagian besar sampah ini berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pengolahan yang memadai (D. Lamongan, 2021). Hal ini menyebabkan penumpukan sampah dan potensi pencemaran lingkungan yang signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengembangkan program "Sampahku Tanggung Jawabku" (Samtaku), yang merupakan inovasi pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi berstandar internasional (Arfah, 2021). Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan nilai ekonomis dari sampah melalui proses daur ulang (Sukarelawati, 2020).

TPST Samtaku Lamongan, yang berlokasi di Desa Banjarmendalan, memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 60 ton per hari. Dalam masa percobaan operasional dari Maret hingga November 2020, TPST ini berhasil mengolah 3.950 ton sampah, dengan 20% di antaranya adalah sampah plastik (Liputan6, 2020). Melalui metode pemilahan manual dan mekanis, TPST Samtaku mampu memisahkan sampah

sulit terurai bernilai ekonomis dari sampah mudah terurai hingga 95% (Kusbiantoro, 2020).

Implementasi TPST Samtaku membawa dampak signifikan terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA Tambakrigadung. Sebelumnya, TPA ini menerima 50-60 ton sampah per hari, namun setelah adanya TPST Samtaku, jumlah tersebut berkurang menjadi 6-10 ton per hari, yang merupakan residu. Penanganan sampah juga meningkat menjadi 77,5% dari sebelumnya hanya 45,5%, diikuti dengan pengurangan sampah dari 8,9% menjadi 22,5% (Liputan6, 2020).

Selain manfaat lingkungan, TPST Samtaku juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna kini diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti botol, papan, kaos, dan pupuk kompos. Produksi pupuk kompos mencapai 100 ton per tahun, yang sementara ini diberikan secara gratis kepada masyarakat (Lamongankab, 2021).

Keberhasilan TPST Samtaku Lamongan dalam mengelola sampah secara efektif menjadikannya sebagai model pengelolaan sampah masa depan yang dapat direplikasi di daerah lain (Lamongankab, 2021). Program ini menunjukkan bahwa dengan inovasi, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta penggunaan teknologi yang tepat, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi serta lingkungan.

Dengan demikian, TPST Samtaku Lamongan tidak hanya berhasil mengurangi timbulan sampah secara signifikan, tetapi juga mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan (Prokopim.lamongankab.go.id, 2022). Inovasi ini menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan sampah yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

2. Kolaborasi Kelembagaan

Program “Lamongan Hijau” merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam upaya penanggulangan sampah plastik. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, pegiat lingkungan, pelajar, dan warga setempat. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini adalah pelaksanaan aksi bersih-bersih lingkungan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, yang melibatkan ratusan peserta dalam kegiatan pungut sampah di berbagai titik di Lamongan (Ainun, 2025).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengembangkan program “Lamongan Green and Clean” (LGC), sebuah kompetisi lingkungan antar wilayah yang

berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, dan bebas sampah. Program ini telah berjalan lebih dari 10 tahun dan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2024, sebanyak 106 wilayah RT di Lamongan berhasil meraih Penghargaan LGC dalam berbagai kategori, menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (S. Lamongan, 2025).

Penghargaan Desa Bersih dan Lestari (Berseri) juga menjadi bukti keberhasilan kolaborasi ini. Sebanyak 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Lamongan berhasil meraih penghargaan Berseri pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan di tingkat desa dan kelurahan, meliputi aspek pengelolaan sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), konservasi sumber daya air, penggunaan energi baru terbarukan, serta kebersihan lingkungan di tingkat RT/RW (Fahmi, 2024).

Keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam program "Lamongan Hijau" tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, program ini berhasil menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bijak.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam implementasi program "Lamongan Hijau" menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara berbagai pihak dapat menghasilkan perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa dengan komitmen bersama dan partisipasi aktif masyarakat, tantangan pengelolaan sampah plastik dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

3. Partisipasi Komunitas

Bank sampah dan inisiatif komunitas di Kabupaten Lamongan telah memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, berbagai komunitas lokal telah berhasil mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan sosial.

Salah satu contoh nyata adalah Bank Sampah "Berkah Mandiri" yang beroperasi di Kabupaten Lamongan. Melalui program ini, masyarakat dapat menabung sampah yang telah dipilah, seperti plastik dan kertas, yang kemudian dikonversi menjadi nilai ekonomi. Pendapatan tambahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai modal usaha kecil, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Wulandari, 2025).

Inisiatif serupa juga dilakukan oleh Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Gajah, Desa Rejosari. Mahasiswa Unisda membantu merevitalisasi bank sampah di wilayah tersebut, yang tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan kas desa (Savhira, 2024).

Di Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Bank Sampah Srikandi telah berhasil menciptakan kampung yang bersih dan hijau melalui pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas, seperti belum adanya bangunan khusus untuk kegiatan bank sampah, masyarakat setempat tetap aktif dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah secara rutin (Devin Natasya et al., 2022).

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan telah memberikan dukungan melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengelola bank sampah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengoptimalkan pengurangan sampah dari sumbernya (D. Lamongan, 2020).

Program-program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat menghasilkan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, bank sampah dan inisiatif komunitas di Lamongan telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam program “Lamongan Hijau” bukan hanya menjadi jawaban atas persoalan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Inisiatif seperti bank sampah, revitalisasi TPS, hingga inovasi teknologi daur ulang membuktikan bahwa ketika sinergi antar pihak terjalin dengan baik, maka sampah bukan lagi masalah, melainkan sumber daya yang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti minimnya infrastruktur, kesadaran publik yang masih rendah, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal, semangat gotong royong dan komitmen untuk perubahan yang lebih hijau tetap menjadi kunci utama. Lamongan tidak hanya bergerak menuju wilayah yang bersih, tetapi juga menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam menciptakan masa depan yang lestari dan berdaya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat ekosistem kolaboratif antara lembaga pemerintahan, komunitas lokal, sektor swasta, dan institusi pendidikan dalam pengelolaan sampah. Diperlukan langkah konkret berupa peningkatan fasilitas infrastruktur hijau, pelatihan berkelanjutan bagi pengelola bank sampah, serta penyusunan kebijakan insentif bagi

masyarakat yang aktif dalam kegiatan daur ulang. Selain itu, pendekatan edukatif yang inovatif dan berbasis kearifan lokal harus diperluas guna membentuk budaya sadar lingkungan yang tumbuh dari akar rumput. Terakhir, penguatan sistem evaluasi dan monitoring yang transparan akan memastikan bahwa setiap program berjalan efektif dan mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman. Dengan langkah-langkah tersebut, Lamongan tak hanya mampu mewujudkan target "Bersih 2025", tetapi juga menjelma sebagai pionir daerah berketahanan lingkungan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ainun, F. (2025). Lamongan Peringati HPSN 2025 dengan Lomba Pungut Sampah. Beritajatim.Com. https://beritajatim.com/lamongan-peringati-hpsn-2025-dengan-lomba-pungut-sampah?utm_source=chatgpt.com
- Ali, S., Setiawan, H., & Erison, Y. (2024). Collaborative Governance in the Development of a Chinese Java Acculturation Tourism Village in Besani Blado Village. *IJSSPP*, 2(1), 42–50.
- Arfah, H. (2021). Program Samtaku, Pengolahan Sampah di Lamongan Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik. Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2021/11/19/212735078/program-samtaku-pengolahan-sampah-di-lamongan-raih-penghargaan-inovasi?utm_source=chatgpt.com
- Natasya, D. (2022). Pengelolaan Bank Sampah Srikandi untuk Menciptakan Kampung Green and Clean di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 486-499.
- Erison, Y., Sholikin, A., Surur, M., Mabruri, M. A., Rosyid, H., & Habibah, N. (2023). "Leadership and Smart Environment Policy" Studi Kasus Implementasi Smart Environment di Pekanbaru. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(03), 521-535.
- Fahmi, Z. (2024). 12 Desa/Kelurahan di Lamongan Raih Penghargaan Bersih dan Lestari (Berseri) dalam Puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024. Infolamongan.Id. https://infolamongan.id/12-desa-kelurahan-di-lamongan-raih-penghargaan-bersih-dan-lestari-berseri-dalam-puncak-hari-lingkungan-hidup-sedunia-2024/?utm_source=chatgpt.com
- Ilham, M. (2020). Dengan TPST Samtaku, Sampah di Lamongan Berkurang. SurabayaPagi.Com. https://surabayapagi.com/news-207774-dengan-tpst-samtaku-sampah-di-lamongan-berkurang?utm_source=chatgpt.com
- KLHK. (2023). Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah. Sipsn.Menlhk.Go.Id. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

- Kusbiantoro, D. (2020). Diresmikan Wagub Jatim, TPST Samtaku Lamongan miliki kapasitas pengolahan 60 ton sampah/hari. *Antaraneews.Com*. https://jatim.antaranews.com/berita/434264/diresmikan-wagub-jatim-tpst-samtaku-lamongan-miliki-kapasitas-pengolahan-60-ton-sampah-hari?utm_source=chatgpt.com
- Lamongan, B. K. (2023). Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2023. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Lamongan, D. (2020). Pengelolaan dan Pengadaan. DLH Lamongan.Co.Id. https://dlhkotamojokerto.co.id/pengelolaan_pengadaan/?utm_source=chatgpt.com
- Lamongan, D. (2021). Samtaku: Inovasi Pengelolaan Sampah Menggunakan Teknologi Berstandar Internasional. *Diskominfo.Lamongankab.Go.Id*. <https://diskominfo.lamongankab.go.id/posting/2100>
- Lamongan, S. (2025). Daftar Pelaksanaan Program Kegiatan DWP Pusat / Kabupaten Lamongan. *Laporan*. https://www.dwp.or.id/laporan/datacetak/1_15_10?utm_source=chatgpt.com
- Lamongankab, P. (2021). Lamongan Inovasikan Samtaku, Model Pengelolaan Sampah Masa Depan. *Portal.Lamongankab.Go.Id*. https://portal.lamongankab.go.id/posting/2053?utm_source=chatgpt.com
- Liputan6. (2020). Tekan Jumlah Sampah ke Laut, TPST Samtaku Lamongan Diresmikan. *Liputan6.Com*. https://www.liputan6.com/news/read/4414597/tekan-jumlah-sampah-ke-laut-tpst-samtaku-lamongan-diresmikan?utm_source=chatgpt.com&page=2
- Rohmah, E. N. L. (2022). Pengelolaan Ruang Publik (Studi Kasus Pembangunan Alun-Alun Lamongan). *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 46–54. <https://doi.org/10.52166/humanis.v14i1.2832>
- Savhira, R. (2024). Unisda Lamongan Kembangkan Bank Sampah Demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jatim.Nu.or.Id*. https://jatim.nu.or.id/pendidikan/unisda-lamongan-kembangkan-bank-sampah-demi-tingkatkan-ekonomi-masyarakat-hqCpU?utm_source=chatgpt.com
- Hendy, Erison, Y., & Choirunnisa. (2024). Rivalry of Issues in the Public Sphere: How are Ecological Issues Positioned in the 2019 Political Party campaigns?. *Indonesian Journal of Social Sciences, Policy and Politics*, 2(1), 34–41.

<https://doi.org/10.62491/jsm.v2i2.2025.55>

<https://doi.org/10.69745/ijsspp.v2i1.67>.

Sholikin, A., Chandra, N. E., Mayrudin, Y. M. A., Fadiyah, D., & Shoimah, S. (2024). Green-Washing and Degree of Transparency in the Extractive Industry Sector in East and West Java. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 7(3), 112.